

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

DKI Dapat Tambahan Anggaran Rp 13,36 Miliar

◆ Untuk Penanganan Kemiskinan

JAKARTA (Poskota) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah anggaran untuk penanganan kemiskinan dan stunting Rp13,36 miliar.

"Dengan alokasi tersebut maka kami menyetujui untuk ditambahkan pada kegiatan yang harus tepat sasaran dan menyentuh langsung kepentingan kesejahteraan masyarakat Jakarta," kata Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/11).

Edi menuturkan kesepakatan itu termasuk

penambahan anggaran Rp28 miliar yang telah dibahas pada rapat pembahasan dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Di mana anggaran Rp28 miliar itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp13,36 miliar dan penambahan alokasi DAK Non Fisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp15,059 miliar.

"Anggaran tersebut merupakan apresiasi Pemerintah Pusat yang diberikan ke DKI dalam bentuk dana transfer yang telah diatur alokasinya," ujar pria yang biasa disapa Pras.

Ketua TAPD Pemprov DKI Jakarta Joko Agus Setyono sebelumnya mengusulkan agar dana transfer Pemerintah Pusat dengan alokasi kegiatan peningkatan kesejahteraan dapat dirinci kembali.

Joko menuturkan perincian kembali itu bertujuan untuk melancarkan dua kegiatan. Yakni penanganan kemiskinan ekstrem di Jakarta sebesar Rp5,96 miliar dan penurunan angka stunting atau tengkes di Jakarta sebesar Rp7,36 miliar.

"Insentif dari pemerintah pusat ini tujuannya sudah ditetapkan yakni untuk mengurangi status stunting dan kemiskinan ekstrem," kata Joko. (*/ifn)